

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Universitas Indonesia, 1990, hlm. 251–252.
- Bagir Manan, “Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah”, Makalah pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 13 Mei 2000, hlm. 1–2. Dikutip dalam Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2012, hlm. 137.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill Co., 1992), hlm.15–20.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 217–220.
- Fitriani Ahlan Sjafrin, “Administrasi Negara dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” dalam Harsanto Nursadi (ed.), *Hukum Administrasi Negara Sektoral*, Depok: Center for Law and Good Governance Studies (CLGS) dan Badan Penerbit FHUI, 2016, hlm. 42–43.
- Georg Jellinek, “Allgemeine Staatslehre” (Berlin: O. Häring, 1900), hlm. 498–505.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), 169–175.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1945, hlm. 124–127.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Anders Wedberg (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945), hlm. 181–196, khususnya pembahasan mengenai *The State as a Legal Order*, serta hlm. 366–373 mengenai identitas dan kontinuitas negara.

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, 1967, hlm. 193–201.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 84–85.

Irawan Soejito, *Teknik Membuat Undang-Undang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988), hlm. 16.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 35–38.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 123–130.

Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, rev. ed. (New Haven: Yale University Press, 1969), 39–41.

Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Kanisius), bagian mengenai hierarki peraturan perundang-undangan.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 41–45.

- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram: Mataram University Press. hlm.71.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm. 89–90.
- Nur Hasan Ismail, 2007. *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, Jogjakarta: Kerjasama HUMA dan Magister Hukum UGM. hlm. 24 – 25.
- Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 133–135.
- Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si, et.al., 2010, *Metodologi Penelitian*, Sumatera Selatan: Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya. hlm.8.
- Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), 2005. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Rajagrafindo, Yogyakarta, 2014, hlm 105-107.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53–60.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet.10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 13.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 14.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160–163.

Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung:

Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 52–54.

Vernando, et al., *Hukum Tata Negara*, Bali: INFES Media, 2022, hlm 202.

Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Lemma: Utrecht, 1988, hlm. 56–59.

Artikel / Karya Ilmiah Lainnya

Ady Supryadi,dkk. 2024. Reformasi Kementerian Negara (Tinjauan Yuridis Dan Implementasinya Dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto). Jurnal Ganec Swara Vol. 18. No. 4, Desember 2024. Hal.2455-2461.

Ahmad Ahsin Thohari. 2023. Langkah Penataan Kelembagaan Untuk Mencapai Reformasi Regulasi Di Indonesia Melalui Pembubaran Lembaga Nonstruktural. Jurnal Yuridis Vol. 10. No. 1, Juni 2023. Hal.16-27.

Devyanti Ramadhani. 2018. “Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Pada Tahapan Evaluasi Dan Klarifikasi”. Badamai Law Journal, Vol. 3. No. 7, September 2018. Hal.264.

Debora L,dkk. 2024. Implikasi Perubahan Undang-Undang Kementerian Negara Terhadap Struktur Pemerintahan. Pusaka. Vol.XVI, No.18, September 2024.

Putu Darmika Susilawati, dkk. 2025. “Batasan Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali Pasca Restrukturisasi Kelembagaan Pada Kemenkumham”. Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3. No. 7, Juli 2025. Hal.XX-XX.

Putri, dkk, 2022, “Reshuffle Kabinet Pemerintahan Jokowi dan Dilema Sistem Presedensial Indonesia”, *Journal of Political Sphere*, 3 (2), halaman: 60-100.

Tri Mulyani, dkk. 2020. “Implikasi Pasca Pencabutan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Peraturan Daerah”. *Adil Indonesia Jurnal*, Vol. 2. No.2, Juli 2020.

Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, “Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System,” *Land Use policy* 27, no. 3, (2010): 983-989.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354) sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97).

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249).

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349).

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385).

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2025 tentang Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 167).

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

Internet

Ahmad Widan Shukoyya, 2024, “Dampak Pengesahan UU No 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan UU No.39 Tahun 2008 Tetang Kementerian Negara Terhadap Stabilitas Keuangan Negara, scribd.com, 24 Maret 2025, diakses 01 Juni 2026, [Dampak UU No. 61/2024 pada Kementerian dan Keuangan | PDF](#).

Dwi Bowo Raharjo. “DPR Punya Wacana Tambah Komisi Imbas Prabowo Bakal Tambah Kementerian, Pimpinan Bilang Begini”, Suara.com. 24 September 2024, diakses 28 September 2025, DPR Punya Wacana

Tambah Komisi Imbas Prabowo Bakal Tambah Kementerian, Pimpinan Bilang Begini.

Ferinda K Fachri, “Prof Susi Dwi Harijanti: Regulasi Indonesia Saat Ini Sangat Bermasalah”, hukumonline.com. 08 September 2023, diakses 06 Juli 2026. [Prof Susi Dwi Harijanti: Regulasi Indonesia Saat Ini Sangat Bermasalah.](#)

I Wayan Agus Nova Saputra, “Persamaan Dan Perbedaan Teori Norma Hans Kelsen Dengan Teori Hierarki Norma Dalam Negara Hans Nawiasky”, materihukumweb.eu.org 30 Agustus 2020, diakses 29 September 2025, <https://www.materihukumweb.eu.org/2020/08/teori-norma-hans-kelsen-dan-tori-hierarki-norma-dalam-negara-hans-nawiasky.html>.

M. Irwan P. Ratu Bangsawan, “Menakar Urgensi Revisi UU tentang Kementerian Negara”, radarhukum.id. 19 Mei 2024, diakses 28 September 2025, Menakar Urgensi Revisi UU tentang Kementerian Negara - Radarhukum.id.

Portal Hukum, “Restrukturisasi di Kementerian Hukum dan HAM Dianggap Memberikan Dampak Positif”, potalhukum.id, 23 Oktober 2024, diakses 01 Juni 2026, [Restrukturisasi di Kementerian Hukum dan HAM Dianggap Memberikan Dampak Positif – Portal Hukum.](#)

Willa Wahyuni, “Mengenal Konsep Keabsahan Asas Presumptio Iustae Causa”, hukumonline.com. 27 Juli 2023, diakses 25 Februari 2026, Mengenal Konsep Keabsahan Asas Presumptio Iustae Causa.

Ziaggi, “Pengertian Kerangka Berpikir: Jenis, Manfaat, dan Cara Membuatnya”,
unsim.ac.id 19 Januari 2024, diakses 4 Oktober 2025, Pengertian
Kerangka Berpikir: Jenis, Manfaat, dan Cara Membuatnya - Universitas
Stradale Insitute Merdeka (unsim.ac.id).